**KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM DEMONSTRASI PRO DEMOKRASI**

**DI HONG KONG**

**Junaidi[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This research aimed to explain the reasons for the United States being involved in pro-democracy demonstrations in Hong Kong in 2019. These reasons are analyzed using the concepts of Liberal Interventionism and Neorealism Theory. The reasons why the United States was involved in pro-democracy demonstrations in Hong Kong, among others, was due to the existence of legal rules that regulated the US justification for being involved in Hong Kong, namely the HK Policy Act 1992, then there was motivation to prevent human rights violations and the democratic crisis by realizing an international democratization program that was sustainable, and the desire to maintain political influence in Hong Kong in order to safeguard its large economic interests and on the other hand also to stem China influence.*

 ***Keywords: United States reasons, Pro Democracy Demonstrations, HK Policy Act 1992, United States Interest.***

**Pendahuluan**

Sejak dikembalikan kepada Tiongkok pada tahun 1997 oleh Inggris, Hong Kong menjadi wilayah administrasi khusus negara Tiongkok, yang menjalankan pemerintah dengan pola *one state two systems* (satu negara dengan dua sistem). Dengan menjadi bagian administrasi khusus Tiongkok, pelaksanaan *one state two systems* berimbas pada beberapa hal, seperti Hong Kong yang menggunakan sistem liberalis dalam aspek ekonomi, sosial dan politiknya sehingga tidak berlakunya sistem sosialis milik Tiongkok di Hong Kong dan pemberian hak otonomi yang luas dalam segala urusan bagi Hong Kong, kecuali untuk urusan luar negeri dan pertahanan. Hal tersebut berlaku dari 1997 hingga 2047 yaitu selama 50 tahun. (Alvin Y.So. 2011).

Namun dalam pelaksanaannya, prinsip *one state two systems* mulai tergerus keberadaannya karena adanya amandemen undang-undang ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong yang diketahui memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat Tiongkok untuk mengizinkan seluruh negara atau wilayah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sehingga pihak Tiongkok juga termasuk dalam salah satu wilayah yang diizinkan. Padahal sebelum itu, Tiongkok sangat dikecualikan oleh Hong Kong. Hal ini akhirnya menjadi awal pemicu demonstrasi yang terjadi di Hong Kong (Sarah Cook. 2019).

Demonstrasi yang terjadi di Hong Kong awalnya menuntut untuk dibatalkannya RUU ekstradisi yang direncanakan oleh pemerintah Hong Kong. Akan tetapi, pemerintah tidak mendengarkan tuntutan yang dilakukan oleh para demonstran sehingga terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat polisi yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi. Demonstrasi yang terus melakukan aksi untuk menolak RUU ekstradisi ini setidaknya hampir menghentikan seluruh kegiatan yang berada di Hong Kong. Akhirnya, pemerintah Hong Kong yang telah merasa tertekan karena gelombang demonstrasi yang terus meningkat terpaksa untuk membatalkan RUU ektradisi dan meminta kepada demonstran untuk menghentikan aksinya (CNBC. 2019). Namun, hal tersebut tidak menghentikan jalannya demonstrasi di Hong Kong karena tuntutan mereka berujung pada menuntut demokrasi secara penuh di Hong Kong.

 Demonstrasi yang awalnya menuntut untuk dihentikannya amandemen undang-undang ekstradisi kini telah berujung pada tuntutan kemerdekaan. Poin-poin dari tuntutan tersebut ialah hak pilih yang bebas, melakukan investigasi atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparatur polisi, membebaskan demonstran yang ditangkap, melakukan reformasi aturan penertiban umum yang menjadi dasar penangkapan, dan meminta agar Carrie Lam untuk mundur dari jabatannya. Dari seluruh tuntutan yang ada, pemerintah Hong Kong belum menanggapi tuntutan tersebut dan terus melakukan tindakan represif kepada demonstran melalui pihak aparat yang bertugas (Olivia Enos. 2019).

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat yang bertugas kepada demonstran mengakibatkan banyak demonstran yang mengalami luka-luka dan bahkan meninggal dunia (Ethan Meick. 2019). Hal ini membuat dunia internasional mengecam tindakan tersebut dan merespon dengan pernyataan resmi, dimana salah satunya ialah Amerika Serikat yang telah lama memiliki kedekatan dengan Hong Kong. Bahkan Kongres Amerika Serikat merespon dengan mengatakan bahwa RUU ekstradisi tersebut akan membuat Hong Kong rentan akan paksaan politik yang diinginkan Tiongkok. Tidak hanya merespon melalui penyataan resmi, Amerika Serikat juga menunjukkan dukungan kepada demonstran di Hong Kong. (Michael C. Davis and Thomas E. Kellogg. 2020) Keterlibatan Amerika Serikat dinyatakan dengan mengecam tindakan-tindakan brutal oleh para aparat polisi yang bertugas. Kemudian Amerika Serikat juga mendukung dengan mengamandemen *The Hong Kong Policy Act 1992*,yang merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang disahkan dalam bentuk UU untuk mengatur segala hubungan ekonomi, sosial dan politik dengan Hong Kong (U.S Government Information. 2019).

Dengan adanya amandemen ini, semakin mempertegas keterlibatan Amerika Serikat di Hong Kong karena dalam amandemen tersebut salah satunya ialah memberikan sanksi kepada pejabat Hong Kong yang terlibat dalam demonstrasi tersebut berupa membekukan aset dan melarang masuk ke wilayah Amerika Serikat khususnya di Washington. Kemudian, amandemen ini juga menambahkan undang-undang terkait demokrasi dan hak asasi manusia di Hong Kong tahun 2019 sesuai dengan keinginan para demonstran Hong Kong (Congress Gov. 2019). Selain itu, Amerika Serikat juga disinyalir terlibat dalam demonstrasi di Hong Kong dengan memberikan bantuan dana serta pelatihan-pelatihan kepada aktivis-aktivis pro demokrasi Hong Kong melalui organisasi mereka yaitu CIA dan NED. Hal ini semakin memperjelas bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu suplai dana terbesar gerakan demontrasi pro demokrasi di Hong Kong (Hendrajit 2020).

 Akan tetapi keterlibatan Amerika Serikat dalam demonstrasi di Hong Kong dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan dan urusan dalam negeri Tiongkok. Keterlibatan Amerika Serikat juga dianggap akan mengubah pandangan dunia Internasional terhadap Tiongkok yang kemudian mendukung Amerika Serikat melalui beragam protes hingga sanksi yang semakin menekan Tiongkok. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat di Hong Kong juga akan memperparah hubungan dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

**KerangkaTeori**

**Konsep Liberal Intervensionisme**

Di dalam buku William Clapton mengenai *Liberal Intervensionisme* merupakan pandangan dasar mengapa negara liberal melakukan intervensi di negara lain. *Liberal Intervensionisme* ini memberikan kriteria dasar mengapa negara melakukan intervensi karena adanya keinginan untuk mempromosikan demokrasi liberal di negara yang menjadi subjek intervensi. Di sisi lain, negara liberal ini melaksanakan intuisi demokrasi liberal dengan tata kelola yang baik sehingga hal ini bisa menjadi contoh kepada negara yang menjadi subjek intervensi (Wiliam Clapton, 2014).

Selain itu, konsep ini juga berorientasi padaHAM, negara liberal dinilai perlu untuk melakukan Intervensi dengan tujuan untuk menegakkan HAM karena krisis demokrasi yang terjadi. Hal ini dilakukan agar promosi demokrasi liberal dapat tercapai. Krisis demokrasi yang terjadi di Hong Kong dan berujung pada masalah pelanggaran HAM menjadi dasar Amerika Serikat terlibat di Hong Kong (Paul Du Gay, 2005).

**Teori Neorealisme**

Menurut John Mearsheimer, Neorealisme akan selalu berpandangan bahwa memperoleh kekuatan sebanyak mungkin dan menganggap bahwa penaklukan atau dominasi itu penting karena dengan memiliki kekuatan yang luar biasa adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dan bertahan hidup (Mearsheimer, 2014).

Mearsheimer menyimpulkan beberapa poin alasan suatu negara terlibat di negara lain , yang pertama berdasarkan penjelasan awal ialah ingin mengejar kekuatan dan kekuasaan dengan cara menjadi kekuatan yang hegemon di kawasan Regional dan mencegah kekuatan baru muncul di kawasan tersebut . Kemudian , yang kedua ialah adanya keinginan untuk menguasai ekonomi di kawasan tersebut demi menyokong kekuatan secara menyeluruh. Ketiga, karena adanya keinginan untuk menguasai *Land Power* sebagai bentuk perluasan kekuasaan. Dan terakhir, keinginan menguasai Nuklir (Mearsheimer, 2014).

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak serta merta hanya berorientasi pada masalah HAM dan Demokrasi semata akan tetapi diikuti dengan adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai di Hong Kong.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam hal ini ialah Alasan Amerika Serikat terlibat dalam demonstrasi pro Demokrasi di Hong Kong.

**Hasil dan Pembahasan**

Amerika Serikat yang memberikan dukungannya kepada demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong melalui pernyataan resmi pejabat-pejabatnya dan bahkan melalui kongres mereka, Amerika Serikat mengamandemen *HK Policy Act 1992* sebagai bentuk keterlibatannya secara resmi di Hong Kong. Amandemen ini memberikan tambahan mengenai Demokrasi dan HAM serta adanya sanksi kepada pejabat Hong Kong maupun Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran HAM kepada para demonstran yang melakukan aksi dan menghentikan sementara ekspor peralatan pengamanan aparat yang bertugas di Hong Kong. Selain itu, Amerika Serikat juga terlibat dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong dengan melakukan pemberian dana untuk melaksanakan aksi demonstrasi melalui organisasi mereka yaitu NED (*National Endowment for Democracy*) dan melakukan pelatihan kepada aktivisi-aktivis yang melakukan aksi di Hong Kong melalui anggota CIA (*Central Intelligence Agency*).

Dari semua bentuk operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat memperlihatkan pola-pola keterlibatannya. Terlebih dengan adanya amandemen *HK Policy Act 1992* yang secara resmi menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung demonstrasi ini. Padahal hal ini dapat memicu konflik dengan pihak Tiongkok yang masih memegang kedaulatannya atas Hong Kong. Bahkan pihak Tiongkok sendiri telah memberikan sanksi kepada pihak Amerika Serikat. Akan tetapi, Amerika Serikat tetap menyatakan dukungannya kepada demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.

1. **Konsep *Liberal Intervensionisme***

 Alasan-alasan awal mengapa Amerika Serikat terlibat dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong ialah karena adanya komitmen yang telah ada untuk menangani HAM dan adanya motivasi untuk melakukan program demokratisasi internasional yang berkelanjutan.

1. **Komitmen Amerika Serikat**

Amerika Serikat sebagai negara dengan pelaksanaan intuisi demokrasi liberal yang baik merasa penting untuk terlibat di negara atau wilayah yang ditekan hak-haknya dan adanya pengikisan nilai-nilai demokrasi. Amerika Serikat sebagai pilar utama dari demokrasi di seluruh dunia dan juga sebagai salah satu pilar yang menjunjung Hak Asasi Manusia di dunia menilai bahwa Amerika Serikat merasa perlu dan berkewajiban untuk terlibat di Hong Kong. Hal ini telah tertuang sejak deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, dimana Amerika Serikat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasinya.

Kemudian, adanya pernyataan tegas dari *Doktrin Carter* yang mengaitkan masalah Hak Asasi Manusia dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat dalam pengukuhan *National Security Strategy* 2017 menyebutkan dalam poin 3 pilar yaitu pelestarian perdamaian melalui kekuatan, dimana secara tegas menyebutkan sekutu dan mitra Amerika Serikat akan memperbesar dan melindungi kepentingan bersama serta akan bertanggung jawab yang lebih besar untuk menangani ancaman yang lazim. Kemudian pada poin 4 pilar yaitu meningkatkan pengaruh Amerika Serikat, hal ini jelas merupakan upaya Amerika Serikat untuk terus memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia dan hak-hak individu dan kesejahteraan.

Kemudian, Amerika Serikat juga menjelaskan tentang kebijakannya terkait HAM dan Demokrasi di situs resmi *U.S Department of State*, dimana dalam situs resmi tersebut menjelaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas Hak Asasi Manusia yaitu mempromosikan penegakan Hak Asasi Manusia termasuk kebebasan individu dan mempromosikan aturan hukum yang sah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia secara internasional serta berkoordinasi dengan lembaga dan organisasi mengenai Hak Asasi Manusia dalam melakukan penanganan agar dapat terselesaikan. (U.S Departmen of State. *Human Right and Democracy.* 2019)

Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki tujuan yaitu mempromosikan demokrasi sebagai alat keamanan, stabilitas, dan kemakmuran seluruh dunia. Kemudian, membantu negara-negara demokrasi yang baru dibentuk untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara benar dan membantu pendukung demokrasi di seluruh dunia untuk membentuk demokrasi di negara mereka sendiri serta mengkritik rezim yang menyangkal Hak warganya untuk melakukan pemilihan yang bebas, aman dan transparan. Hal-hal ini lah yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat mengawali keterlibatannya di Hong Kong sehingga memberikan mereka pembenaran bukan hanya di Hong Kong tetapi di seluruh dunia.

Terlebih lagi, adanya motivasi internal di bawah kebijakan luar negeri khusus yang mengatur hubungan Amerika Serikat dengan Hong Kong yaitu *HK Policy Act 1992*. Dalam kebijakan khusus ini, Amerika Serikat menyatakan komitmennya dengan membuat kebijakan khusus yang mengatur hubungannya dengan Hong Kong dalam segala bidang seperti ekonomi bisnis, politik, dan keamanan. Amerika Serikat berkomitmen akan mendukung segala urusan Hong Kong termasuk memelihara entitas berbeda dari pemerintah pusat Tiongkok mereka dan menjaga Hong Kong untuk tetap menjadi wilayah yang memiliki sistem demokrasi (Michael C. Davis and Thomas E. Kellogg. 2020).

Beberapa hal inilah yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk terus menyatakan keterlibatannya dalam urusan wilayah Hong Kong, selain karena adanya motivasi yang tertuang dalam beberapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara internasional, Amerika Serikat juga memiliki kebijakan khusus yang mengatur hubungannya dengan Hong Kong dan merasa harus serta berkewajiban untuk menjaga komitmen atas kebijakan khusus tersebut.

1. **Motivasi Amerika Serikat**

Amerika Serikat melihat demokrasi di Hong Kong semakin terkikis karena adanya keterlibatan pemerintah pusat Tiongkok di wilayah otonom Hong Kong membuat Amerika Serikat harus mengambil peran untuk mencegah hal itu terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong sering melakukan aksi demonstrasi karena demokrasi yang selalu di kikis oleh pemerintah Hong Kong itu sendiri. Pemerintah Hong Kong sendiri diketahui merupakan kandidat yang pro terhadap pemerintah pusat Tiongkok, khususnya Kepala Eksekutif yaitu Carrie Lam yang terpilih pada tahun 2017. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat harus berupaya melindungi demokrasi yang berada di Hong Kong.

Amerika Serikat awalnya mendukung demonstrasi di Hong Kong untuk menolak RUU ekstradisi tersebut karena dari poin-poin mengancam kebebasan individu yang berada di Hong Kong melalui penargetan sasaran apabila dinilai membahayakan kepentingan Tiongkok di Hong Kong. Akan tetapi, setelah RUU ekstradisi tersebut dibatalkan ternyata Amerika Serikat ingin memelihara demokrasi secara penuh di Hong Kong karena apabila pemerintahan Hong Kong masih dikendalikan oleh pemerintah pusat Tiongkok melalui sistem demokrasi yang terbatas seperti sebelumnya maka hal ini juga membahayakan kebebasan Hong Kong dan membahayakan pihak Amerika Serikat juga di dalamnya sehingga Amerika Serikat tetap mendukung demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.

 Selain alasan Demokrasi yang ada di Hong Kong, demonstrasi yang terjadi selama kurang lebih setahun ini dengan massa yang jumlah sangat banyak sehingga bentrok dengan aparat polisi yang bertugas membuat banyak demonstran yang mengalami luka-luka bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Penggunaan persenjataan lengkap oleh aparat polisi seperti peluru karet, gas air mata dan meriam air digunakan untuk menekan pihak demonstran agar mudah ditertibkan. Aparat polisi yang bertugas terus menekan pihak demonstran menggunakan cara kekerasan sehingga banyak demonstran yang berjatuhan bahkan ditangkap. Amerika Serikat khawatir dengan krisis Hak Asasi Manusia oleh demonstran Hong Kong saat melakukan demonstrasi yang menurut Amerika Serikat sebagai wujud ekspresi menyatakan pendapatnya terhadap pemerintah Hong Kong (U.S.- China Economic And Security Review Commission).

Oleh sebab itu, pemerintahan yang demokratis selalu menjadi penekanan Amerika Serikat dalam keterlibatannya di suatu wilayah atau negara lain. Reformasi demokrasi harus dilakukan di tengah pemerintahan yang otoriter di kawasan agar kebebasan individu untuk mengemukakan pendapatnya. Mendukung demokratisasi, sistem perekonomian pasar bebas, dan HAM telah menjadi sebuah elemen moral bagi politik luar negeri Amerika Serikat. Program demokratisasi yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat di Hong Kong dalam rangka untuk mempromosikan demokrasi ala mereka, tidak hanya semata-mata untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan menjunjung demokrasi di wilayah Hong Kong akan tetapi lebih jauh Amerika Serikat memiliki hubungan dagang dan bisnis yang baik dengan Hong Kong dengan sistem liberal yang sama dengan Amerika serikat, diharapkan Hong Kong dapat memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat maupun Hong Kong itu sendiri.

Amerika Serikat menjadikan program demokratisasi di Hong Kong sebagai alasan untuk menyatakan keterlibatannya sebagai upaya untuk merubah struktur politik yang ada agar lebih pro terhadap pemerintahannya. Di sisi lain promosi nilai-nilai demokrasi untuk mempermudah kebebasan individu dapat berjalan dengan lancar dan cenderung memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat. Selain itu, promosi nilai-nilai demokrasi yang terjadi di Hong Kong pasti tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan lain yang Amerika Serikat inginkan di Hong Kong.

1. **Teori Neorealisme**

 Berakhirnya Perang Dunia Kedua dan setelah Jepang, Eropa, Inggris yang telah kehilangan kekuatannya dalam peran kapitalis global, secara tidak langsung Amerika Serikat telah menduduki atau mendominasi perekonomian pasar dunia. Hal ini dilakukan dengan pengambilan kebijakan yang berdampak pada sistem global, yaitu dengan adanya Organisasi-Organisasi Internasional yang telah diperbarui, yaitu: World Trade Organization, International Monetary Fund dan Bank Dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat dijuluki sebagai negara hegemoni di dunia ini (Dewi Masitoh. 2018).

 Akan tetapi, di tengah kekuatan Amerika Serikat yang selalu menjadi negara hegemon, Tiongkok datang sebagai negara yang mulai menunjukkan perkembangan pesatnya dan muncul sebagai pesaing Amerika Serikat yang baru. Reformasi ekonomi Tiongkok yang telah diagendakan sejak lama dan kini telah berhasil menjadi kekuatan yang mendominasi perekonomian di dunia. Tiongkok tercatat telah mengalami peningkatan ekonomi dari tahun ke tahun, bahkan menurut *Gross Domestic Bruto* (GDP) dari tahun 1970-2014 tercatat bahwa Tiongkok berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai pesaing utamanya di dunia dan mengungguli negara lain seperti negara-negara Eropa dan Jepang. Tiongkok yang memiliki kendali penuh atas sistem perekonomiannya membuat negara ini mampu maju dan menuju sebagai kekuatan hegemoni yang baru di dunia.

 **Gambar 1. *Gross Domestic Bruto* (GDP) dari tahun 1970-2014 Amerika Serikat dan Tiongkok**



 Tiongkok yang merasa telah mendapatkan perannya dengan baik dalam sektor ekonomi, maka Tiongkok merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pertahanan serta militernya. Hal ini dilakukan Tiongkok agar dapat memainkan peran di ranah regional maupun global. *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) mencatat pada tahun 2017, Tiongkok mencatatkan dirinya sebagai negara dengan anggaran belanja militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan menjadi negara nomor satu yang meningkatkan belanja militernya setiap tahun. Amerika Serikat sendiri meskipun tetap menjadi nomor satu dalam perbelanjaan militer akan tetapi menurut data dari SIPRI mengalami penurunan dibandingkan Tiongkok yang terus meningkatkan anggaran belanja militernya (SIPRI, *Military Expenditure*. 2016).

**Gambar 2. Anggaran Belanja Militer Negara**

 Melihat perkembangan Tiongkok yang mulai menyaingi posisinya sebagai kekuatan hegemon, Amerika Serikat mulai memfokuskan kebijakannya untuk membendung pengaruh Tiongkok baik secara ekonomi maupun ideologi. Di antaranya *Pivot to Asia*, *Trans Pacific Patnership*, bahkan dalam *National Security Strategy* mengatakan bahwa Tiongkok telah berusaha menggeser posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon di dunia. telah berusaha menggeser pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik melalui ekspansi ekonomi atau memperluas jangkauan ekonomi dibawah kendali Tiongkok. Hal ini yang mendasari Amerika Serikat terus melakukan aksi keterlibatan dengan negara-negara atau wilayah yang memiliki kedekatan dengan Tiongkok agar hubungan dengan Tiongkok tidak terlalu dekat atau sifatnya memiliki ketergantungan (M. Najeri Al Syahrin. 2018).

 Amerika Serikat yang mulai mengekang pengaruh Tiongkok melalui negara-negara berdekatan dengan Tiongkok seperti Jepang, India, Korea Selatan bahkan Taiwan. Kemudian yang semakin dekat posisinya ialah Hong Kong. Hong Kong yang awalnya dilihat Amerika Serikat hanya sebagai pusat ekonomi yang bebas kini lebih jauh memiliki posisi yang penting untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Amerika Serikat menginginkan Hong Kong sebagai pos terdepan di wilayah Tiongkok untuk dapat membendung pengaruh Tiongkok menyebar sebagai bentuk dari kepentingan nasional dan juga menginginkan Hong Kong tetap berada di bawah wilayah yang otonom dan tetap menjalankan sistem kapitalis untuk membantu mewujudkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat (Jerome C. A. Dkk. 2019).

1. **Kepentingan Ekonomi**

Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan utama Asia, telah lama menarik investasi asing karena reputasinya seperti pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan perlindungan hak, termasuk buruh dan hak kekayaan intelektual (Sarah Cook. 2019). Pelabuhan Hong Kong disebut sebagai penghubung antara Asia dengan Eropa menjadikan posisi Hong Kong sangat penting sebagai pusat ekonomi dunia. Tercatat sebagai wilayah dengan kemudahan berbisnis nomor satu di dunia, menarik negara-negara lain untuk berbisnis di Hong Kong.

Hal ini tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dengan memberikan status khusus kepada Hong Kong yang mana status khusus tersebut diantaranya dolar Amerika Serikat bebas bertukar dengan dolar Hong Kong, adanya penerapan tarif dagang yang relative minim dan bahkan dalam beberapa komiditi hampir tidak ada, dan adanya bebas visa perjalanan pun juga diberlakukan. Selain itu, penerapan sanksi dagang yang ditujukan kepada pemerintah pusat Tiongkok dan seluruh wilayah lain di daratan Tiongkok tidak berlaku di Hong Kong. Hal ini yang membuat para pelaku ekonomi Amerika Serikat banyak membangun perusahaan mereka di Hong Kong karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Hong Kong. (U.S Department of State. *US-Hong Kong relations*. 2019).

Kurang lebih dari 1.351 perusahaan Amerika Serikat beroperasi di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, dan sekitar 290 diantaranya merupakan kantor pusat regional Asia, 434 kantor dengan fungsi koordinasi regional, dan 627 kantor lokal hanya melayani urusan di Hong Kong. Pada tahun 2018, surplus perdagangan barang bilateral terbesar Amerika Serikat adalah dengan Hong Kong, dengan nilai 31,1 miliar Dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut berdasarkan ekspor mencapai 37,4 miliar Dolar Amerika Serikat dan impor 6,3 miliar Dolar Amerika Serikat. Hong Kong merupakan pasar terbesar keempat untuk ekspor produk pertanian Amerika Serikat. Kemudian, 85.000 warga Amerika Serikat berada di Hong Kong sebagai pekerja untuk perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Hong Kong.

Akan tetapi kemudahan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat di Hong Kong hanya akan terus berlaku apabila Hong Kong tetap otonom dengan pengaruh demokrasi yang terus berjalan dibawah kerangka One state two system karena apabila Hong Kong tidak cukup otonom dan penerapan demokrasi terkikis maka pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan peninjauan kembali untuk mencabut status khusus dan menjadikan wilayah Hong Kong menjadi sama posisinya dengan wilayah lain di Tiongkok seperti penerapan sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Tiongkok juga berlaku di Hong Kong. Hal inilah yang mendasari Amerika Serikat terlibat dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.

1. **Membendung Pengaruh Tiongkok**

Hong Kong yang posisinya terletak sebagai pos terdepan atas Tiongkok, hal ini digunakan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Hong Kong sebagai alat untuk menekan pihak Tiongkok atau pun sebagai alat untuk membendung pengaruh Tiongkok. Amerika Serikat yang memiliki hubungan yang dekat dengan Hong Kong khususnya dalam mitra dagang dan bisnis setidaknya membuat Hong Kong sedikit banyaknya akan dipengaruhi Amerika Serikat.

 Setelah Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997, kelanjutan tujuan khusus Hong Kong oleh Amerika Serikat tetap dilaksanakan dengan konsep penerapan yang berbeda. Amerika Serikat menggunakan prinsip Hong Kong yaitu One State Two System atau tetap menggunakan status british Hong Kong dengan sistem yang semula digunakan pada era pemerintahan Inggris dengan terus memelihara perjanjian bersama HK Policy Act 1992 dan berusaha agar Hong Kong tetap demokratis karena dengan demokratisnya Hong Kong dan seluruh kegiatan politik di Hong Kong dilakukan dengan system demokrasi maka akan membentuk pemerintahan yang diinginkan oleh warga Hong Kong dan secara khusus akan sedikit banyaknya mendukung pemerintah Hong Kong dan di sisi lain status khusus Hong Kong secara berkelanjutan terus terjalin dan upaya untuk mengejar tujuan strategisnya di Hong Kong dapat terlaksana.

Tujuan strategis Amerika Serikat ialah seperti menjadikan pelabuhan Hong Kong sebagai basis kunjungan armada militer Amerika Serikat di wilayah Tiongkok. Bahkan dalam beberapa kunjungan kapal perang Amerika Serikat di Hong Kong disinyalir melakukan kerjasama dengan unit layanan di Hong Kong meskipun hanya dalam bentuk upaya penanganan terorisme. Akan tetapi, sejak dahulu pelabuhan Hong Kong dijadikan tempat untuk menyediakan suplai persenjataan pada perang antara Amerika Serikat-Vietnam. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki tujuan untuk membangun aparatus intelijen luar negeri terbesar Amerika Serikat di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hong Kong yang menampung stasiun CIA dan atase FBI skala besar dan melakukan propaganda anti-komunis melalui Layanan Informasi Amerika Serikat. Hal-hal tersebut hanya akan dapat tercapai dengan memelihara demokrasi yang berada di Hong Kong. (U.S Departmen of States. Office of The Historian).

**Kesimpulan**

Alasan Amerika Serikat dapat dianalisis dengan konsep *Liberal Intervensionisme* yang menujukkan posisi Amerika Serikat mendukung demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong karena adanya komitmen berdasarkan asas negara liberal dengan tata kelola yang baik untuk menjunjung demokrasi dan HAM di seluruh dunia dan hal tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan termasuk kebijakan khusus yang mengatur hubungannya dengan Hong Kong yaitu *HK Policy Act 1992*. Selain itu, adanya krisis demokrasi yang terjadi di Hong Kong dan berujung pada demonstrasi untuk menuntut demokrasi secara penuh dapat terlaksana di Hong Kong. Namun akibat dari demonstrasi yang terus berlanjut membuat beberapa demonstran mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa program demokratisasi harus dilakukan di Hong Kong di tengah pemerintah pusat Tiongkok yang semakin agresif dan bersifat otoriter terhadap warga Hong Kong. Tujuannya ialah agar promosi demokrasi liberal dapat terlaksana dengan baik kemudian struktur politik di Hong Kong lebih mengedepankan kepentingan warga Hong Kong. Serta, teori Neorealisme yang digunakan untuk menjawab alasan keterlibatan Amerika Serikat di Hong Kong ialah karena adanya upaya mempertahankan pengaruh politiknya di Hong Kong untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keinginan untuk membendung pengaruh Tiongkok.

 **Daftar Pustaka**

ABC Australia. “Mengapa Rakyat Hong Kong Marah Soal Ekstradisi ke China?”, *Detiknews*, tersedia di https://news.detik.com/abc-australia/d-4584833/mengapa-rakyat-hong-kong-marah-soal-ekstradisi-ke-china.

Alvin. “Hong Kong is considering changing the law on transferring fugitives – so how are extraditions dealt with now, and why are there no deals with mainland China, Taiwan and Macau?”, *South China Morning Post*” tersedia di https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2185902/hong-kong-considering-changing-law-transferring-fugitives-so,

Cartalucci, Tony. “Hong Kong’s 'Occupy Central' is US-backed Sedition”, *NEO New Eastern Outlook*, tersedia di https://journal-neo.org/2014/10/01/hong-kong-s-occupy-central-is-us-backed-sedition/,

Christiastuti, Novi. “Parlemen Hong Kong Resmi Batalkan RUU Ekstradisi yang Picu Demo Besar”**,** *Detiknews*, tersedia di https://news.detik.com/internasional/d-4757113/parlemen-hong-kong-resmi-batalkan-ruu-ekstradisi-yang-picu-demo-besar.

Clapton, William. 2014. *Risk and Hierarchy in International Society Liberal Interventionism in the Post-Cold War Era*, Palgrave Macmillan, London.

CNN Indonesia. “Cegah Intervensi Asing, China Dukung RUU Ekstradisi Hong Kong” tersedia di https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190610180337-113-402181/cegah-intervensi-asing-china-dukung-ruu-ekstradisi-hong-kong

Cook, Sarah “Democratic Crisis in Hong Kong: Recommendations for Policymakers”, Freedom House : policy brief, published August, 2019, https://apo.org.au/node/257151.

Cora, Chan. (2019). *Demise of “One Country, Two Systems”? Reflections on the Hong Kong Rendition Saga*, Hong Kong Law Journal 447, no 98.

Congress.Gov. *United States-Hong Kong Policy Act of 1992*.

Davis, Michael C. and Kellogg, Thomas E. (2020). *The Promise of Democratization in Hong Kong : Discontent and Rule of Law Challenges*, National Democratic Institute and Georfetown Center for Asian Law.

Department of Justice The Hong KongSAR.”Laws of Hong Kong and Legal System in Hong Kong”, tersedia di https://www.doj.gov.Hong Kong/eng/index.html.

Du Gay, Paul. 2005. *The Values of Bureaucracy*, Oxford University Press, New York.

Embassy of The People’s Republic of China in The Republic of Liberia. *Topic : Hong Kong*, tersedia di http://lr.china-embassy.org/eng/zt/xgwt/P020190826694751576879.pdf

Fong, Brian C.H. “Hong Kong and the US-China New Cold War Will Hong Kong be a “Free World outpost” or a bastion for “Red China”?”, *The Diplomat*, tersedia di https://thediplomat.com/2019/05/hong-kong-and-the-us-china-new-cold-war/,

Graubart, Jonathan. “R2P and Pragmatic Liberal Interventionism: Values in the service of Interests”, *John Hopkins University Press*, 2013.

Hendrajit, “Morton Holbrook, Agen CIA di Balik Aksi-Aksi Demontrasi di Hongkong”, *The Global Review*, tersedia di https://theglobal-review.com/lama/content\_detail.php?lang=id&id=16470&type=105.

Hidriyah, Siti. (2019). “Aksi Unjuk Rasa Di Hong Kong Dan Respons Internasional”, Info Singkat Bidang Hubungan Internasional: Vol. XI, No.16/II/Puslit/Agustus/2019.

Hong Kong Bar Association. “A Brief Guide To Issues Arising From The Fugitive Offenders And Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 (“The Bill”)”,2019

Hong Kong Government. *History*, tersedia di https://www.yearbook.gov.hk/2016/en/pdf/E22.pdf.

J. Mearsheimer, John. 2014. *The Tragedy of Great Power Politics*, University of Chicago, New York.

Jerome, A. C, Jacques D, dkk. 2019. “The Taiwan Relations Act at 40”, *Foreign Policy Research Institute*.

Maharani, A. “Revolusi payung untuk pemilihan langsung”. tersedia https://www.merdeka.com/dunia/revolusi-payung-untukpemilihan-langsung.html

Mangkuto, Wangi Sinintya. “Hong Kong Kian Mencekam, Ini Kronologi 5 Bulan Demo,” *CNBC Indonesia*, tersedia di https://www.cnbcindonesia.com/news/20191115133256-4-115559/hong-kong-kian-mencekam-ini-kronologi-5-bulan-demo/2.

Masitoh, Dewi. 2018. *Upaya Pertahanan Hegemoni Amerika Serikat Dalam Menghadapi Dominasi Tiongkok Pada Periode Presiden Barack Obama*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia

Mark Peceny and Shannon Sanchez-Terry. “Liberal Interventionism in Bosnia”, *University of New Mexico*, 2009.

Meick, Ethan. 2019. “Hong Kong’s Proposed Extradition Bill Could Extend Beijing’s Coercive Reach: Risks for the United States”, *USCC Issue Brief*.

Michael F. Martin. “Hong Kong’s Protest 2019”, *Congressional Research Service*, (Okt 2019).

Nauvarian, Demas. 2019 “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam: Faktor Ideologi, Identitas, dan Idealisme”, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga Vol 12, No 2*.

Olivia Enos, “Responding to Threats to the Rule of Law in Hong Kong”, *The Heritage Foundation : Issue Brief*, no 5018, (Dec 2019):2, http://report.heritage.org/ib5018.

Rasyid, Suparman. 2013. *Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Tengah (Penguasaan Minyak di Laut Kaspia)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Ratnasari, Fadhila Eka. “ Hukum dasar Hong Kong buah matang dari Konstitusi Tiongkok”, *Mata-mata poltik*, tersedia di https://www.matamatapolitik.com/china-sahkan-uu-keamanan-nasional-hong-kong-sayonara-demokrasi-in-depth/.

Romei, Valentino. “How Hong Kong’s economy is reeling from the protests — in 7 charts,” *Financial Times*, tersedia di https://www.ft.com/content/0dd8e27e-0ae0-11ea-bb52-34c8d9dc6d84.

Sherlock, S. “Hong Kong and the Transfer to China: Issues and Prospects”, Foreign Affairs, Defence and Trade Group: https://www.aph.gov.au/About\_Parliament/Parliamentary\_De partments/Parliamentary\_Library/Publications\_Archive/CIB/ CIB9697/97cib33

SIPRI, 2018, *Military Expenditur*, tersedia di https://www.sipri.org/research/armament-anddisarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure

Syah Utomo, Happy F. “Headline: Pernyataan G7 Bikin Tiongkok Meradang, Efeknya Ke Demo Hong Kong?,” *Liputan 6*, tersedia di https://www.liputan6.com/global/read/4049299/headline-pernyataan-g7-bikin-china-meradang-efeknya-ke-demo-hong-kong**.**

Syahrin, M. Najeri Al. 2018. “China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Global Strategis Universitas Airlangga*, Vol 12 No 1.

The Basic Law of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China

Timothy Dunne, Milja Kurki, Steve Smith. 2010. *International Relations Theories : Discipline and Diversity*, Oxford Univesity Press, Oxford.

U.S.- China Economic And Security Review Commission, *Annual Reports 2019 : Chapter 6- Hong Kong*.

U.S Department of State. *2019 Hong Kong Policy Act Report*, tersedia di https://www.state.gov/2019-hong-kong-policy-act-report/.

U.S Departmen Of State. *Human Rights and Democracy*, tersedia di https://www.state.gov/policy-issues/human-rights-and-democracy/,

U.S Departmen of States. Office of The Historian, *Statement Of U.S. Policy On Hong Kong*, Foreign Relations Of The United States, 1958–1960, China, Volume Xix 335. National Security Council Report, tersedia di https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v19/d335.

U.S Departmen Of State. *United States-Hong Kong Relations*, tersedia di https://www.state.gov/u-s-relations-with-hong-kong/.

U.S Government Information, *S-1838 One Hundred Sixteenth Congress of the United States of America*, tersedia di https://www.govinfo.go.v/content/pkg/BILLS-116s1838enr/pdf/BILLS-116s1838enr.pdf

Yang, C. “The Practice of the "One Country, Two Systems" Policy in the Hong Kong Special Administrative Region”. Juni, 2014 tersedia di https://web.archive.org/web/20141008210149/http://news.xin huanet.com/english/china/2014-06/10/c\_133396891.htm

Yoo S, Alvin. 2011. ‘‘One Country, Two Systems’’ and Hong Kong-China National Integration: A Crisis-Transformation Perspective”, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 41, No. 1, February 2011, pp. 99–116.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : Pratamajunn@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)